

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kredibilitas Pandangan Jogja yang lahir dari media sosial Instagram dan TikTok sebagai *homeless media* tidak dibangun melalui legitimasi institusional, melainkan melalui relasi antara praktik produksi konten, audiens, dan mekanisme platform digital. Karakter Pandangan Jogja sebagai *homeless media* menunjukkan nilai tersendiri dalam memilih pemberitaan dan tidak melakukan *repost*, sehingga berbeda dengan *homeless media* lain. Pandangan Jogja memproduksi konten dengan mengacu pada prinsip jurnalistik, namun tetap menyesuaikan format, ritme, dan gaya penyajian sesuai karakter platform. Dalam konteks ini, kredibilitas lebih banyak dibentuk melalui kedekatan dengan audiens dan tingkat *engagement* dibandingkan standar jurnalistik formal.

Dalam kerangka ekonomi politik media, praktik tersebut menunjukkan proses komodifikasi, di mana perhatian audiens menjadi nilai utama yang diproduksi melalui konten. Spasialisasi terlihat dari kemampuan Pandangan Jogja memperluas jangkauan distribusi melalui platform digital, meskipun tetap bergantung pada algoritma. Sementara itu, dalam aspek strukturalisasi, Pandangan Jogja tetap berada dalam pengaruh struktur dominan, yaitu platform digital yang mengatur visibilitas dan distribusi konten. Hal ini menegaskan bahwa praktik media tidak sepenuhnya otonom, melainkan dibentuk oleh tekanan logika platform.

Di sisi lain, Pandangan Jogja belum memenuhi standar kredibilitas media secara utuh. Ketidakterdaftarannya dalam Dewan Pers, tidak adanya struktur organisasi formal sesuai standar perusahaan media, serta belum adanya pimpinan redaksi sebagai wartawan utama dan dominasi wartawan muda menunjukkan kelemahan pada aspek legalitas, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Dalam hal ini kredibilitas Pandangan Jogja dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 1 ayat (2) mengenai badan hukum, Pasal 5 terkait kewajiban akurasi dan hak jawab, serta Pasal 12 mengenai kejelasan penanggung jawab, dan menunjukkan bahwa kredibilitas Pandangan Jogja tidak sepenuhnya maksimal karena belum memenuhi kriteria formal sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Kondisi ini menjadi titik kritik terkait media yang kredibel seharusnya memiliki sistem verifikasi, struktur redaksi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam perspektif ekonomi politik media, hal ini sekaligus menunjukkan kecenderungan Pandangan Jogja mempertahankan fleksibilitas produksi konten di tengah tekanan platform, sekaligus menghindari konsekuensi regulatif dan tanggung jawab kelembagaan yang lebih ketat. Di sinilah letak kontradiksi, di satu sisi menjalankan praktik jurnalistik, tetapi di sisi lain tidak memenuhi standar kelembagaan yang menjadi dasar kredibilitas. Hal ini menegaskan bahwa kredibilitas Pandangan Jogja bersifat negosiatif, sehingga belum terpenuhi secara utuh. Akibatnya, kredibilitas yang dibangun lebih bertumpu pada persepsi audiens dan performa konten, bukan pada standar jurnalistik yang bersifat institusional.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Pandangan Jogja

Adapun saran bagi Pandangan Jogja adalah sebagai berikut. Pandangan Jogja perlu tetap menjaga konsistensi dalam proses kerja jurnalistik, terutama dalam akurasi, keberimbangan informasi, dan peliputan langsung sebagai pembeda dari praktik *homeless media* lain yang cenderung hanya melakukan *repost*. Di sisi lain, posisi Pandangan Jogja saat ini menunjukkan bahwa kredibilitas yang dibangun masih lebih banyak bertumpu pada kepercayaan audiens dan performa konten.

Pandangan Jogja perlu mempertimbangkan untuk mendaftarkan diri ke Dewan Pers sebagai bentuk penguatan legitimasi media. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, kredibilitas Pandangan Jogja tidak sepenuhnya maksimal karena tidak memenuhi kriteria pasal, khususnya terkait badan hukum dan penanggung jawab redaksi. Tanpa pengakuan formal, ketika terjadi kesalahan informasi, mekanisme koreksi cenderung terbatas pada klarifikasi sederhana, sehingga posisi media menjadi lebih rentan secara profesional. Dengan terdaftar di Dewan Pers, Pandangan Jogja memiliki standar yang lebih jelas, perlindungan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat.

Dengan demikian, Pandangan Jogja perlu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas sebagai media berbasis platform dan pemenuhan standar jurnalistik secara kelembagaan. Fleksibilitas memang menjadi keunggulan, tetapi jika tidak diimbangi dengan penguatan struktur dan legitimasi formal, hal tersebut dapat membatasi kredibilitas media dalam jangka panjang.

Penguatan ini penting agar media tidak hanya diakui secara popularitas, tetapi juga memiliki dasar perlindungan dan kepercayaan yang lebih kuat ketika menghadapi persoalan, termasuk yang berpotensi masuk ke ranah hukum. Ketergantungan pada platform memang membuka ruang eksistensi, tetapi jika tidak diimbangi dengan penguatan struktur dan standar, justru berpotensi menjadi tantangan bagi keberlanjutan kredibilitas media.

5.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut. Penelitian ini masih terbatas pada satu objek media, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan beberapa *homeless media* untuk melihat variasi praktik dan strategi dalam membangun kredibilitas di platform digital. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait fenomena *homeless media* di Indonesia.

Penelitian ini belum dapat menggambarkan persepsi audiens secara general, mengingat pendekatan kualitatif yang digunakan berfokus pada kedalaman data, bukan pada generalisasi. Dengan begitu penelitian selanjutnya dapat melakukan dengan menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), misalnya melalui penelitian kuantitatif untuk mengukur persepsi audiens terhadap kredibilitas media, serta penelitian kualitatif untuk menggali praktik redaksional dalam membangun kredibilitas.